

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia termasuk dalam negara dengan peringkat korupsi tertinggi di dunia (Transparency International, 2005). Pada tahun 2019 Indonesia menduduki posisi ke 85 dari 180 negara yang di survei oleh Transparency International dan hal ini masih menunjukkan bahwasanya angka korupsi di Indonesia masih terbilang sangat tinggi. Di Indonesia, kecurangan akuntansi masih ditunjukkan dengan terdapatnya penutupan atau pembatalan beberapa Bank, dilaporkannya manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan, perkara kesalahan atau kebusukan perbankan, penyalahgunaan atau penyelewengan pajak, penyelewengan dikomisipenyelenggaraan pemilihan umum, korupsi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Bestari, 2016).

Fenomena atau fakta yang terjadi rangkaian (perkembangan) sektor Publik di Indonesia sesudah reformasi ialah meningkatnya tuntutan akuntabilitas atas institusi sektor public, baik sektor public pusat maupun sektor public daerah (Mardiasmo, 2009). Kecurangan akuntansi di Indonesia semakin meningkat dengan adanya kebijakan desentralisasi pengelolaan keuangan negara hingga ke level daerah. Negara Indonesia telah mengamanatkan penerapan otonomi daerah melalui undang-undang. Pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, kecuali bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan peraturan pemerintah. Semakin luasnya perwujudan otonomi ialah mandat dari UU No.22 Tahun 1999, berhubungan dengan pemerintah Daerah

dan kemudian diperbaiki dengan diterbitkannya UU NO.23 tahun 2004 No.9 tahun 2015 (perubahan ke-2 atas UU No.23 Tahun 2014). Menurut Redjo (2017), telah terjadi kecenderungan korupsi di pemerintah daerah yang meningkat sejak tahun 2001.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2019 terdapat sebanyak 576 korupsi, dengan 1298 tersangka dan dengan nilai suap sebesar Rp 211 milyar dengan total kehilangan negara mencapai Rp 6,5 triliun. Modus korupsi yang paling banyak digunakan/terjadi adalah penyalahgunaan anggaran yaitu sebanyak 154 perkara dengan jumlah kehilangan yang diderita negara sejumlah Rp 1,2 triliun, penggelembungan (mark-up) dan pungutan liar dengan masing-masing 77 kasus dan 71 kasus. ICW juga menyatakan bahwa lembaga yang tercatat paling banyak melakukan korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan jumlah kasus sebanyak 222 dan derita kehilangan negara sebesar Rp 1,17 triliun. Hal ini menunjukkan kasus korupsi di keuangan daerah masih tergolong cukup tinggi (IHPSI, 2018). Mengacu pada data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tercatat sebanyak 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbukti melakukan korupsi. Dari 2.357 orang yang terlibat diantaranya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di tingkat pusat sebanyak 98 orang dan di tingkat provinsi sebanyak 2.269 (pemerintah provinsi sebanyak 342 orang, pemerintah kabupaten/kota sebesar 1927) (www.kompas.com.)

Menurut ICW 2018 Jawa Timur termasuk dalam Provinsi Dengan Kasus korupsi Kepala Daerah Terbanyak. Pada tahun 2017, menurut ICW kasus korupsi di Jawa Timur terdapat 68 perkara dengan kehilangan yang diderita negara sejumlah Rp. 90,2 miliar.

Pada saat tahun 2019 terjadi kasus korupsi pengadaan buku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dengan kehilangan yang diderita negara mencapai jumlah Rp. 1,9 Miliar. Dalam kasus ini ditetapkan sebagai tersangka mantan sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Nur Qodim oleh Kejari Pamekasan. Nur Qodim ditahan karena jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) program pengadaan buku mata pelajaran (Taufiqurrahman, 2019.). Lebih lanjut sangat banyak sekali kasus kecurangan yang melibatkan beberapa dinas di Kabupaten Pamekasan yang pernah dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke kejari, kejagung, dan KPK. Salah satunya seperti pada akhir

tahun 2018, Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) melaporkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atas beberapa kasus yang salah satunya adalah dugaan korupsi terhadap program pagar taman Arek Lancor dengan pagu anggaran Rp 1,7 M. Namun, peruntukannya tidak jelas yang terindikasi dari pagar setinggi 1,8 meter tidak sesuai dengan RAB (Revol Afkar, 2018).

Kecenderungan kecurangan akuntansi telah memukau kepedulian media sebagai desas-desus yang masih timbul/masih menjadi topik utama. Terdapat dugaan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tren korupsi dalam pengertian dan terminology dikarenakan adanya keikutsertaan beberapa komponen yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta menyesatkan, penyelewengan aturan atau penyelewengan kepercayaan dan juga yang terakhir omisi fakta kritis (Soepardi, 2007:24) dalam (Fauwzi. 2011). Secara umum kecurangan dapat terjadi dikarenakan terdapatnya tekanan demi melaksanakan penyelewengn/adanya keinginan untuk mempergunakan kesempatan yang ada. Sementara Dorminey (2011), mengatakan bahwa elemen yang merupakan salah satu ciri penyelenggara ataupun pelaku kecurangan akuntansi yang tidak bisa di nilai secara umum kecurangan akuntansi sangat erat kaitannya dengan tindak korupsi. Perilaku menyimpang yang dilaksanakan dalam tindakan korupsi ialah memanipulasi pencatatan, penghapusan dokumen, serta *mark-up* yang memberikan keugian terhadap negara.

Kecurangan akuntansi sering kali diidentikkan dengan perilaku oportunistik. *Fraud diamond* ialah bentuk evolusi dari pada teori fraud triangle dimana teori ini dicetuskan oleh (Cressey, 1953). Dimana teori *fraud diamond* ini merupakan pedoman baru terhadap/kepada *fraud* yang cetuskan oleh wolfe & Hermanson (2004). Menurut teori *fraud Diamond* terdapat 4 hal inilah yang memberikan pengaruh atau menjadikan seseorang untuk mengerjakan tindak kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), Relasionalisasi (*Rationalization*), serta yang terakhir Kemampuan (*Capability/Capacity*)

Faktor pertama adalah kesesuaian kompensasi. Kompensasi adalah upah/gaji yang diperoleh oleh karyawan dari tempat ia bekerja/perusahaan baik dalam bentuk kompensasi

langsung seperti gaji, upah, bonus, komisi serta kompensasi tidak langsung berupa tunjangan-tunjangan atas kontribusi dan pekerjaannya dalam membantu organisasi mencapai tujuannya (Putri. 2019). Penelitian terdahulu yang membahas kecenderungan kecurangan akuntansi dengan variabel kesesuaian kompensasi antara lain, Rahmi (2019), Amalia (2015) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh kepada kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil berbeda diperoleh oleh Ahriati (2015), Bertenputra (2015) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak memberikan pengaruh/berpengaruh kepada kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor kedua adalah ketaatan aturan akuntansi. Ketaatan Aturan Akuntansi merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan dalam instansi guna menaati semua peraturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan serta penyusunan laporan keuangan demi mewujudkannya transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan serta hasil pelaporan keuangannya efektif, handal dan Informasi yang diberikan terjamin keakuratannya. (Shintadevi, 2015). Hernandez and Groot (2007) mengemukakan bahwa terdapat 2 elemen penting terkait dengan kecenderungan seseorang dalam melaksanakan kecurangan akuntansi, dua elemen itu yakni etika serta lingkungan. penelitian terdahulu yang membahas kecenderungan kecurangan akuntansi yang menggunakan variabel ketaatan akuntansi antara lain Bartenputra (2016), Dewi (2017) yang menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil berbeda diperoleh dari Fitria (2016) yang menyatakan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor ketiga adalah asimetri Informasi. Asimetri Informasi ialah suatu kondisi yang terjadi akibat adanya perbedaan Informasi diantara pihak penyedia Informasi dan pihak yang membutuhkan informasi. (Bartenputra. 2016). Penelitian terdahulu yang membahas tentang kecenderungan kecurangan akuntansi dengan variabel asimetri Informasi Randiza (2016), Widjajanti (2019), Indriastuti (2016) yang menyatakan bahwa asimetri Informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan Nita (2019) yang menyatakan asimetri Informasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil berbeda

diperoleh dari Ahriati (2015) yang menyatakan bahwa asimetri Informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor keempat yang diduga dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal berperan penting untuk meminimalkan terjadinya tindak kecurang yang terjadi didalam instansi. (Udayani, 2017). Sistem pengendalian internal sangat berperan aktif pada sebuah organisasi dalam hal melakukan pengawasan kemampuan atau keahlian pegawai dalam instansi (Gayatri, 2017). The Committee on Sponsoring the Treadway Committee (COSO) di dalam Modul 1 Gambaran Umum Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (2009), mendefinisikan pengendalian intern sebagai cara yang dilakukan oleh pihak manajemen dan personil lain yang ada di instansi, yang disusun guna memperoleh kepercayaan terdapat perubahan yang lebih baik dalam hal pencapaian tujuan-tujuan yang efektif serta efisiensi operasi, kecakapan pelaporan keuangan, serta taat pada peraturan yang ada (Rahmi, 2019). Penelitian terdahulu yang membahas tentang kecenderungan kecurangan akuntansi dengan variabel pengendalian internal antara lain Rodiah (2019), Amalia (2015), Indriastuti (2016) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil berbeda diperoleh dari Ahriati (2015), Rahmi (2019), Sari (2019) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Dan faktor yang terakhir adalah moralitas individu. Moralitas individu menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh/mempengaruhi pada seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi. Artinya, dengan tingginya tingkat moralitas yang dimiliki oleh individu, maka ia akan lebih mementingkan kepentingan yang lebih luas dibandingkan mementingkan kepentingan pribadinya saja atau instansi. (Prawira, 2014). peneliti terdahulu yang membahas kecenderungan kecurangan akuntansi dengan variabel moralitas individu antara lain, Lahaya (2015), Ade (2017) yang menyatakan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil berbeda diperoleh oleh Fitri (2016) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Teori relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fraud*

Diamond (Cressey, 1953) menyatakan bahwa *Fraud Diamond* ialah bentuk evolusi dari pada teori *fraud triangle* dimana teori ini dicetuskan oleh (Cressey, 1953). Dimana teori *fraud diamond* ini merupakan pedoman baru terhadap/kepada *fraud* yang cetuskan oleh wolfe & Hermanson (2004). Menurut teori *fraud Diamond* terdapat 4 hal inilah yang memberikan pengaruh atau menjadikan seseorang untuk mengerjakan tindak kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), Relasionalisasi (*Rationalization*), serta yang terakhir Kemampuan (*Capability/Capacity*)

Mengacu pada penelitian Rahmi (2019) dan Putri (2019) peneliti tertarik untuk meneliti kembali penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan judul “Pengaruh keseuaian kompensai, ketaatan aturan akuntansi, asimetri Informasi, pengendalian internal, moralitas individu. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena masih tingginya kasus kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor publik, dan juga terdapat beberapa kesenjangan hasil dari peneliti terdahulu terkait dengan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Pembeda dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan adalah: penelitian ini dikembangkan dengan menambah variabel baru yakni ketaatan aturan akuntansi. Peneliti memilih variabel ketaatan akuntansi karena berdasarkan hasil penelitian Fitri (2016) yang menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya (Shintadevi, 2015). Penelitian ini dilakukan di kabupaten Pamekasan. Alasan memilih Kabupaten Pamekasan sebagai tempat penelitian karena di Pamekasan pernah terjadi kasus korupsi yang dimana pelakunya merupakan sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh OPD kabupaten Pamekasan dikarenakan kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dan juga berkenaan dengan OPD sebagai pengguna anggaran yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi. Hal menarik lainnya adalah Pamekasan yang mendapat julukan kota Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) sejak tahun 2000 tidak sesuai dengan harapan masyarakat islami yang dibuktikan maraknya kasus korupsi yang terjadi, khususnya di sektor pemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan peneliti di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
2. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
3. Apakah asimetri Informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
4. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
5. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
2. Untuk mengetahui apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
3. Untuk mengetahui apakah asimetri Informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
4. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
5. Untuk mengetahui apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan bisa memberi berbagi pengetahuan yang lebih universal terkait dengan teori *fraud diamond*, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri Informasi, pengendalian internal, moralitas Individu, yang bisa menjadi tambahan referensi bagi peneliti yang memiliki tema yang hamper serupa pada masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap dalaam hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, mengurangi atau meminimalisir asimetri Informasi, pengendalian internal, moralitas individu, serta supaya segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan apa yang diharapkan serta dapat mengurangi aatau meminimalisir terjadinya kecurangan akuntasnsi